



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT KLIWON

23 JUNI 2023 (4 BESAR 1956 / TAHUN LXXVIII NO 255)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

BELUM KANTONGI IZIN PEMANFAATAN TKD

Satpol PP DIY Segel Dua Tempat Usaha

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY kembali melakukan penyegelan di dua tempat usaha yang dibangun di tanah kas desa (TKD) di kawasan Maguwoharjo Sleman. Dua lokasi yang disegel, Maguwoharjo Football Park dan Pangeran Riverside ditutup sementara karena belum memiliki izin resmi dari Gubernur DIY untuk pemanfaatan TKD.

"Kalau untuk pelanggarannya masih sama yaitu tidak memiliki izin Gubernur berkaitan dengan penggunaan TKD. Sebenarnya dua pemilik tempat usaha tersebut sudah sempat dipanggil Satpol PP DIY pada 9 Mei 2023. Pemanggilan itu dilakukan untuk BAP dan membuat surat pernyataan terkait kesanggupan untuk menghentikan semua aktivitas di lokasi setelah pemeriksaan tersebut. Namun ternyata ada laporan bahwa masih terdapat aktivitas di dua lokasi tersebut," kata Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY Qumarul Hadi di Yogyakarta, Kamis (22/6).

Penyegelan dilakukan di depan pintu masuk kawasan tersebut. Petugas juga melakukan penempelan stiker tanda pelanggaran pada sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Penutupan kedua lokasi

ini belum dapat dipastikan akan memakan waktu hingga berapa lama.

Saat dimintai komentar, pemilik PT Abinaya Karsa Aditama Kahudi Wahyu Widodo mengaku menghormati keputusan pemerintah setempat. Dirinya berupaya secepat mungkin menyelesaikan masalah perizinan agar Maguwo Football Park dapat kembali beroperasi. Mengingat Maguwo Football Park yang dikelolanya telah mendapat apresiasi dari federasi dan klub-klub bola profesional tanah air. Penyegelan tersebut menjadikan program-program pembinaan yang dirancangnya tersekat.

"Sebetulnya kami telah berupaya mengurus izin Gubernur DIY hingga tiga tahun lamanya. Tapi proses pengajuan perizinan memang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kalurahan, kabupaten, hingga provinsi. Untuk itu kami akan berusaha agar secepat mungkin bisa menyelesaikan perizinan ini. Hikmahnya jadi biar segera selesai izinnya, karena saya juga tidak bisa tenang, mengingat aktivitas di sini sudah sangat banyak," jelasnya, seraya menambahkan, rencananya pengembangan Maguwo Football Park untuk bisnis dan edukasi melalui pembangunan akademi sepak bola. (Ria)-f



Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY memasang stiker tanda pelanggaran pada sebuah tempat usaha yang berdiri di lahan tanah kas desa (TKD) di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kamis (22/6/2023).

MENAG BERI APRESIASI

Petugas Haji Harus Istikamah

MAKKAH (KR) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi atas dedikasi dan sikap istikamah dalam



melayani jemaah, baik di Makkah maupun di Madinah. Meskipun demikian, ia mengingatkan layanan petugas yang jadi titik fokus adalah saat puncak haji yang akan dimulai

27 Juni di Arafah.

"Oleh karena itu, layanan yang paling penting dalam tahapan haji adalah ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina)," ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas, ketika menyambangi jemaah haji di Raffah Hotel Makkah, Kamis (22/6).

Menag menyatakan, sebagai ujung tombak dan tulang punggung, suksesnya haji berada di tangan PPIH. Bantuan dan layanan yang diberikan petugas menjadi penting dalam berbagai tahapan ibadah haji yang dijalani jemaah, khususnya saat pelaksanaan Armina, yang diharapkan dapat terus membantu, mengawasi dan melayani jemaah. * Bersambung hal 15 kol 3



KR-Antara/Wahyu Putro A

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berbincang dengan jemaah haji, Suminah Sadami Sardi (103) dari kloter SOC 89 asal Rembang, Jawa Tengah, di Makkah, Arab Saudi.

Korlantas Evaluasi Tes Jalur Angka 8 Dikaji, Syarat Sertifikat Pemohon SIM

JAKARTA (KR) - Direktur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Dirregidents) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya masih mengkaji syarat sertifikat mengemudi dan belum menetapkan penggunaan syarat tersebut bagi pemohon surat izin mengemudi (SIM). "Kalau ditanya kapan diberlakukan, kami jawab belum dilaksanakan, karena kami masih mengkaji," kata Yusri Yunus di Mabes Polri, Kamis (22/6).

Ia menjelaskan hal itu tidak ha-

nya terkait persiapan aturan pelaksanaan di tingkat bawah, tetapi juga soal pemangku kepentingan yang terlibat dalam sertifikasi mengemudi tersebut. Sertifikat mengemudi tersebut, lanjutnya, harus diperoleh dari lembaga pendidikan terakreditasi. Begitu pula dengan instruktur yang melatih juga harus bersertifikat dari lembaga berwenang.

Lembaga pendidikan mengemudi yang bisa mengeluarkan sertifikat itu, ujar Brighen Pol Yusri Yunus, harus memenuhi akreditasi dari sejumlah lembaga, mulai dari Dinas

Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.

Instruktur di lembaga pendidikan mengemudi itu pun harus memiliki sertifikat dan telah mengikuti pelatihan instruktur di Indonesia Safety Driving Center (ISDC) yang berada di Serpong, Tangerang dan dari sejumlah Polda. "Itulah tempat untuk latihan mengemudi dan juga untuk melahirkan instruktur-instruktur sekolah mengemudi yang memiliki sertifikasi yang terakreditasi," jelas Yusri. * Bersambung hal 15 kol 1



Analisis KR Rahasia Rakyat

Dr Aprinus Salam

KALAU ada sesuatu yang biasa disebut sebagai *rahasia negara*, apakah rakyat juga boleh punya rahasia? Kenapa harus ada rahasia negara? Padahal, sejauh ini, tidak ada apa yang disebut sebagai *rahasia rakyat*. Apakah sebenarnya justru negara yang berdaulat, sehingga rakyat apa-apa hal negara memang di atas rakyat dan hukum. Lantas, kenapa masih ada yang percaya dengan kedaulatan rakyat? Bagaimana posisi dan relasi negara dan rakyat?

Apapun semua hal terkait undang-undang, peraturan, berbagai kebijakan di tingkat negara, yang berhubungan dengan hajat dan kehidupan rakyat, tidak ada dan tidak boleh dirahasiakan, baik dari hulunya hingga hilirnya. Menjadi sangat mengherankan bahwa nasib rakyat yang, katanya, dikelola dan dimandatkan kehidupannya pada negara. Tetapi rakyat tidak boleh tahu bagaimana dirinya dikelola nasibnya.

Apakah negara boleh punya rencana? Tentu boleh. Apakah pemerintah boleh punya rencana? Tentu juga

* Bersambung hal 16 kol 4

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:44	15:04	17:34	18:48	04:29

Jumat, 23 Juni 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

TERSEBAR DI YOGYA, JAKARTA DAN MANADO KPK Sita Aset Rafael Senilai Rp 150 M

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) berupa 20 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 150 miliar. Aset RAT yang disita lembaga antirasuah tersebar di tiga kota, yakni enam bidang tanah dan bangunan di Jakarta, tiga aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado Sulawesi Utara. "Total dari 20 aset yang disita ini jumlahnya mencapai Rp 150 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (22/6)

Ali menjelaskan, penyitaan aset tersangka RAT merupakan langkah KPK dalam melakukan optimalisasi * Bersambung hal 16 kol 1

Pakai Upanat, Kaisar Naruhito Keliling Candi Borobudur



KR-M Thoha

Kaisar Jepang saat melakukan kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.

MAGELANG (KR) - Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi Candi Borobudur, Kamis (22/6). Kedatangan Kaisar Naruhito ini merupakan nostalgia memori kunjungan masa lampau ayahanda, Kaisar Akihito yang berkunjung ke Candi Borobudur pada tahun 1991.

Kedatangan Kaisar Naruhito disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama TWC Febrina Intan, Sub Koordinator Museum dan Cagar Budaya Borobudur (MCB) Wiwit Kasiyati. Staf Edukator Museum dan Cagar Budaya

* Bersambung hal 16 kol 1

BPJS Biayai Pengobatan Pasien Covid

JAKARTA (KR) - BPJS Kesehatan menyatakan tetap menanggung biaya pengobatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 meski Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan Indonesia sudah mulai memasuki masa endemi. Alasannya, pasien yang terinfeksi akan masih tetap ada meski negara sudah memasuki masa endemi walaupun jumlahnya kian menurun.

"Kemarin Presiden berpidato, sejak 21 Juni 2023, status pandemi Covid-19 sudah resmi dicabut di Indonesia dan mulai memasuki endemi. Artinya, kalau ada peserta yang kena Covid-19, itu tanggung jawabnya BPJS, dan kami siap untuk itu," tegas Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti usai peluncuran uji coba i-Care JKN di Jakarta, Kamis

(22/6).

Dijelaskan, tanggungan biaya akan dibayarkan oleh BPJS, tidak hanya berlaku bagi peserta yang terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja. Melainkan juga untuk kelas-kelas lainnya, selama nama yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS. "Semua peserta BPJS kalau kena Covid-19 sekarang ini kita siap untuk membiayai. Ini untuk semua peserta," tandas Ali.

Ditambahkan, begitu pasien secara resmi masuk dan dirawat di rumah sakit, BPJS akan menanggung biayanya dengan catatan sesuai dengan hasil diagnosis yang dikeluarkan oleh tenaga medis * Bersambung hal 15 kol 3

MARI CEGAH KANKER SERVIKS
Pemeriksaan Pap Smear
Rumah Sakit Happy Land Medical Centre

Informasi dan Pendaftaran:
☎ 0274 550060 ☎ 0811 8550 060

RS PKU Bantul

VAKSIN MENINGITIS

☎ 0818-376-888

Pandemi jadi endemi, tetap jaga kesehatan

DATA KASUS COVID-19 Kamis, 22 Juni 2023

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 6.811.528 (+84)	- Pasien positif : 231.264 (+2)
- Pasien sembuh : 6.640.426 (+210)	- Pasien sembuh : 224.697 (+6)
- Pasien meninggal : 161.857 (+4)	- Pasien meninggal : 6.097 (+1)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (Ria/Ira)

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● Di antara calon peserta didik baru yang mendaftar di SMAN 1 Yogyakarta ada yang bernama Sahabat Nabi Di Kehidupan Abadi. Panggilannya Aan. Nama unik yang mengandung doa mulia. (Nursyabani Purnama JI Retno Dumilah 23C Pilahana Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171)-f